

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Mandailing Natal untuk triwulan I (Januari, Februari, dan Maret) tahun 2025 harga relative stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan sementara sesuai dengan mekanisme pasar.
2. Pada tanggal 23 Januari 2025, komoditas minyak goreng harga Rp 18.000,- (naik Rp 500,-/harga modal bertambah), telur ayam ras Rp 28.000,- (turun Rp 2.000,-/harga modal berkurang), telur ayam kampung Rp 42.000,- (turun Rp 3.500,-/harga modal berkurang), cabe rawit hijau Rp 55.000,- (turun Rp 5.000,-/mekanisme pasar), dan bawang merah lokal Rp 35.000,- (turun Rp 2.000,-/barang banyak).
3. Pada tanggal 17 Februari 2025, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga seperti minyak goreng curah kuning Rp 19.500,- (naik Rp 500,-/kg), ayam broiler Rp 29.000,- (naik Rp 2.000,-), cabe merah keriting Rp 48.000,- (naik Rp 13.000,-/barang kosong), cabe rawit hijau Rp 58.000,- (turun Rp 5.000,-/mekanisme pasar), bawang merah lokal Rp 30.000,- (turun Rp 2.000,-/barang banyak).
4. Pada tanggal 19 Maret 2025, beberapa komoditi mengalami penurunan harga seperti gula pasir Rp 18.500,- (turun Rp 500,-/harga modal berkurang), telur ayam ras Rp 26.600,- (turun Rp 800,-/harga modal berkurang), cabe merah keriting Rp 25.000,- (turun Rp 5.000,-/barang melimpah), dan cabe rawit hijau Rp 28.000,- (turun Rp 7.000,-/barang melimpah). Namun masih terdapat komoditas yang mengalami naik seperti bawang putih Rp 43.000,- (naik Rp 1.000,-/mekanisme pasar).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Secara umum harga-harga bahan pokok masih terkendali.
2. Peran strategis dari perangkat daerah terkait terutama anggota TPID agar lebih dioptimalkan, baik dari segi perencanaan kegiatan maupun teknis pelaporan kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaporan Harian Pengendalian Inflasi secara rutin dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten ke aplikasi yang disediakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Melaksanakan Pemantauan Harga dilakukan setiap hari oleh petugas Dinas Perdagangan dan dilaporkan ke aplikasi.
3. Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan periode Maret adalah sebanyak 12 Ton 904 Kg di Bulog Padang Sidempuan.
4. TPID pada tanggal 8 Februari 2025, mengikuti Capacity Building One-on-One TPID 2025 di Parapat.
5. Pada tanggal 12 Februari 2025, TPID melaksanakan Capacity Building Program Unggulan TPID bertempat di Aula Bapperida Kantor Bupati Mandailing Natal, yang dihadiri oleh anggota TPID.
6. Pada tanggal 17 Maret 2025, TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Baru Panyabungan. Pemantauan harga pangan menunjukkan bahwa harga pangan cenderung stabil, namun perlu diwaspadai beberapa komoditi yang cenderung meningkat seperti

minyak goreng agar harganya tetap sesuai dengan HET.

7. TPID dipimpin Wakil Bupati mengikuti High Level Meeting TPID Provinsi Sumatera Utara di Medan pada tanggal 14 Maret 2025.

8. Pada tanggal 24 Maret 2025, Bupati Mandailing Natal melakukan Sidak dan Pemantauan Harga ke Pasar Baru Panyabungan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan himbauan agar Upaya-upaya pengendalian inflasi daerah terus dilakukan oleh seluruh pihak.

2. Gerakan menanam perlu lebih diintensifkan, terutama cabai merah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dibutuhkan Kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi yang membagi habis tugas pengendalian inflasi, khususnya pada perangkat daerah terkait dalam bentuk Surat Edaran Bupati sebagai bentuk penegasan akan pentingnya Upaya-upaya pengendalian inflasi daerah, terutama setelah dilakukan efisiensi anggaran, perlu pengkajian kembali.

2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan agar lebih dioptimalkan pada wilayah kecamatan yang benar-benar membutuhkan intervensi pasar.

3. Proses penandaan/tagging kegiatan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar dilakukan sebagai Upaya perkuatan dukungan manajemen, perlu penyesuaian program/kegiatan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang pada akhirnya akan berdampak pada draft Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027.